

Dinamika Industri Halal di India: Studi Kasus Pemboikotan Produk Halal Oleh Kelompok Sayap Kanan

Fiqih Aqilla Ekowidi¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 60237
fiqihaqilla@gmail.com

ABSTRACT

India is constitutionally a secular country, but this definition does not reflect India's political ideology since the right-wing Bharatiya Janata Party (BJP) came to power. Right-wing groups in India adhere to the Hindutva political ideology. This political ideology is known for its contributions to various controversial policies that frighten minority communities. Such policies include amendments to the 2019 Citizenship Law regarding the issue of Muslim immigrants where they are expelled and killed if they do not leave India immediately. Hindutva's controversial policies also touch on social domains such as the ban on the use of the headscarf by students in schools. Apart from touching on the realm of political policy, Hindutva also broadens its policy influence from an economic perspective. This can be seen in the boycott of halal products in India by right-wing groups. This study will describe the factors that cause halal products to be boycotted by right-wing groups using the conflict tree theory. The research method used is descriptive qualitative. The reason why right-wing groups carry out boycotts of halal products is the ethnocentrism of the Indian Hindu community which is tough, so they cannot accept Islam as it is, this includes the production of halal meat products whose implementation is contrary to Hindu beliefs in India. The second factor is the strong patriotism of the Hindu wing where they object that non-Muslims are involved in the halal production sector, especially meat production, so that a desire to help fellow believers arises. Finally, there is a policy of tightening the production of halal products by the authorized agency that oversees food in India. the author sees that policies that do not consider the domestic situation have triggered massive boycotts by right-wing groups against halal products in India.

Keywords: *Boycott, Halal, Hindutva, India, Right Wing.*

ABSTRAK

Secara konstitusional India adalah negara sekuler, namun definisi ini tidak mencerminkan ideologi politik India semenjak partai Bharatiya Janata Party (BJP) dari kelompok sayap kanan berkuasa. Kelompok sayap kanan di India memegang teguh ideologi politik Hindutva. Ideologi politik ini dikenal atas kontribusinya dalam berbagai kebijakan kontroversial yang membuat takut masyarakat minoritas. Kebijakan tersebut misalnya amandemen UU kewarganegaraan 2019 terkait persoalan imigran Muslim di mana mereka diusir dan dibunuh jika tidak segera pergi dari India. Kebijakan kontroversial Hindutva juga menyentuh ranah sosial seperti larangan penggunaan jilbab bagi siswa di sekolah. Selain menyentuh ranah kebijakan politik, Hindutva juga melebarkan pengaruh kebijakannya dari segi ekonomi. Hal ini bisa dilihat pada upaya boikot produk halal di India oleh kelompok sayap kanan. Penelitian ini akan menguraikan faktor apa saja yang menyebabkan produk halal di boikot oleh kelompok sayap kanan menggunakan teori pohon konflik. Metode penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif. Adapun alasan mengapa kelompok sayap kanan melakukan aksi boikot terhadap produk halal yakni sikap etnosentrisme masyarakat Hindu India yang Tangguh, sehingga tidak bisa menerima Islam apa adanya, ini termasuk dalam produksi produk daging halal yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepercayaan Hindu di India. Faktor kedua yakni kuatnya

patriotisme kelompok Hindu sayap di mana mereka keberatan jika dalam sector produksi halal, khususnya produksi daging tidak akan melibatkan non-Muslim sehingga timbul keinginan membantu sesama rekan seagama. Terakhir adanya kebijakan pengetatan produksi produk halal oleh Lembaga berwenang yang mengawasi makanan di India. penulis melihat bahwa kebijakan yang tidak mempertimbangkan situasi domestik yang memicu terjadinya aksi boikot besar-besaran oleh kelompok sayap kanan terhadap produk halal di India.

Kata Kunci: Boikot, Halal, *Hindutva*, India, Sayap Kanan.

PENDAHULUAN

India merupakan negara sekuler yang terdiri dari komunitas Hindu yang besar. Diketahui jumlah penduduk Hindu di India mencapai 1,093 miliar atau sekitar 78,9% dari total jumlah penduduk India yakni 1,429 miliar (Aulia Mutiara Hatia Putri, 2023a, 2023b). Hal ini menjadikan Hindu sebagai agama mayoritas di India, disusul oleh Islam sebanyak 14,2% dari total jumlah penduduk India, Kristen sebanyak 2,3%, Sikh sebanyak 1,7% dan Buddha sebanyak 0,7% (Office of the Registrar General & Census Commissioner India, 2011). Sebagai sebuah negara sekuler, India memiliki karakteristik proteksionisme tersendiri sebagai sebuah kawasan budaya dalam menerima agama dan kebudayaan lain, termasuk Islam sebagai agama ke-2 yang banyak diikuti oleh masyarakat India. Negara ini merupakan kawasan yang cukup kontroversial dengan modal kekuatan peradaban lokalnya yang sangat kuat dan tangguh sehingga tidak bisa menerima Islam apa adanya. Kekuatan ini ditopang bukan hanya oleh tradisi intelektual atau adat istiadatnya, tetapi juga kekuatan spiritualisme Hindu yang mandarah daging ke dalam adat istiadat negara ini secara keseluruhan. Hal ini kemudian membentuk pola pikiran, kelakuan dan tindakan masyarakatnya yang terintegratif dalam berbagai institusi kelembagaan agama dan pemerintah (Thohir & Kusdiana, 2006). Oleh karena itu, seluruh perilaku, baik tindakan individu maupun sosial secara keseluruhan selalu berada dalam kontrol dan pengawasan aristokrat serta tokoh religious di India, di mana mereka memiliki posisi yang sangat dihormati di negara tersebut.

Kekuatan spiritualisme Hindu yang mengakar kuat dan ditaati oleh seluruh masyarakatnya termasuk dari elemen pemerintah mendorong setiap kebijakan negara tersebut berlandaskan pada spiritualisme Hindu. Salah satu wujud dari spiritualisme Hindu ini adalah adanya ideologi *Hindutva*, yakni ideologi sayap kanan Hindu yang diwakili atau didukung oleh partai politik Partai Bharatiya Janata, atau Partai Rakyat India (BJP). Pada dasarnya, *Hindutva* merupakan sebuah struktur dari Hinduisme, namun *Hindutva* berbeda dengan Hinduisme. Perbedaan dasarnya yaitu bahwa Hinduisme merupakan sebuah agama sedangkan *Hindutva* merupakan nasionalisme Hindu yang berdiri di India sebagai ideologi politik. *Hindutva* dikenal atas berbagai kebijakan kontroversial yang membuat takut masyarakat minoritas (Asyari, 2021). Kebijakan tersebut misalnya amandemen UU kewarganegaraan 2019 terkait persoalan imigran Muslim di mana mereka diusir dan dibunuh jika tidak segera pergi dari India. Selain menyentuh ranah kebijakan politik, *Hindutva* juga melebarkan pengaruh kebijakannya dari segi ekonomi. Hal ini bisa dilihat pada upaya boikot produk halal di India.

Berbagai negara non-Muslim memiliki persyaratan yang meningkat untuk makanan halal, yang telah menjadi pasar berkembang, hal ini disebabkan karena pertumbuhan pasar makanan halal disebabkan oleh dua faktor. Pertama, makanan halal dikenal lebih aman, bersih dan enak. Kedua, makanan halal diadopsi secara luas diantara populasi global melalui proses akulturasi dan asimilasi (Tao et al., 2022). Namun di India, produk halal menjadi topik kontroversial di kalangan mayoritas Hindu di mana mereka melihat pertumbuhan pasar ini sebagai jihad ekonomi Islam sehingga timbul gerakan untuk memboikot produk halal. Banyak boikot terhadap produk biasanya muncul sebagai agitasi karena alasan sosial, nasional, budaya dan agama (Tao et al., 2022). Kasus boikot produk halal di India seperti boikot McDonalds tahun 2019 karena menampilkan logo halal sehingga memicu protes dan boikot besar-besaran dari masyarakat Hindu India (Asyari, 2021).

Selain itu, di tahun 2022, kelompok sayap kanan Hindu juga melakukan kampanye boikot produk halal. Hal ini disebabkan karena Lembaga yang berwenang untuk mengawasi kualitas dan keamanan makanan India meminta para penjual makanan menjalankan prosedur tambahan untuk memastikan produknya halal. Mereka beranggapan bahwa sertifikasi halal saat ini sudah mulai diterapkan ke produk non daging, bahkan mulai diterapkan ke produk non makanan seperti kompleks perumahan, industri fashion hingga kosmetik. Kelompok sayap kanan dalam kampanye-nya kemudian menyerukan masyarakat Hindu untuk membeli produk dari perusahaan dan pedagang Hindu dan menghindari produk halal (Ahmad, 2022).

Adanya upaya untuk menjalankan prosedur tambahan untuk memastikan produk halal di India bukan tanpa sebab. Hal ini disebabkan karena India memiliki potensi sebagai pasar ideal untuk produk halal, mengingat populasi Muslim India yang mencapai 195 juta jiwa. Populasi Muslim India diketahui akan meningkat sebesar 76% pada tahun 2050 jika dibandingkan dengan populasi Muslim India di tahun 2010 sehingga kedepannya, populasi negara-negara Asia Selatan menjadi tempat bagi mayoritas umat muslim dan hindu. Peluang dari penerapan praktik halal ke dalam proses pembuatan produk diikuti dengan perkembangan populasi Muslim sebagai target pasar halal, akan cenderung mengalami pertumbuhan signifikan (Priyambodo, 2022).

Bagi agama Islam, tentu umat Islam harus makan-makanan halal dan menggunakan produk halal. Halal sendiri adalah istilah Bahasa Arab yang berarti 'sah dan diizinkan oleh Allah' sedangkan haram berarti 'dilarang atau terlarang'. Bagi umat Islam, makanan tentu harus halal, gaji harus berasal dari pasar halal dan orang hanya bisa berurusan dengan opsi perdagangan halal. Akibatnya, pelanggan Muslim diwajibkan oleh keyakinannya untuk membeli produk halal. Mengingat Islam sebagai salah satu agama samawi dan agama kedua yang paling banyak diikuti oleh masyarakat dunia setelah Kristen mendorong perusahaan di seluruh dunia memprioritaskan produk halal untuk mendapatkan penetrasi pasar secara total (Tao et al., 2022).

Pelanggan Hindu, terutama mereka yang berasal dari kelompok sayap kanan yang menganut Hindutva melihat produk halal sebagai ancaman ekonomi dan upaya dominasi Islam yang mengancam kepercayaan agama, adat istiadat dan budaya Hindu di India. Oleh karena itu, penelitian ini akan memahami akar permusuhan konsumen Hindu sayap kanan

terhadap produk halal dengan menggunakan teori pohon konflik untuk menganalisis konflik yang melibatkan kelompok Hindu sayap kanan dengan keberadaan produk halal di India berdasarkan faktor-faktor seperti konflik antar agama, etnosentrisme dan patriotisme. Adapun rumusan masalah penelitian yakni mengapa terjadi pemboikotan produk halal oleh kelompok Hindu sayap kanan.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam studi terdahulu, penulis menggunakan beberapa artikel dari jurnal internasional sebagai perbandingan sudut pandang yang menjadi rujukan penulis dalam melakukan penelitian ini. Berbagai penelitian yang dipilih memiliki keterkaitan dalam penelitian ini seperti konflik Hindu dan Islam, keyakinan Hindu terutama mereka yang berasal dari kelompok sayap kanan akan budaya dan agama selain Hindu serta berbagai kebijakan kontroversial sayap kanan hindu di pemerintahan terhadap Muslim sebagai tanda dominasi sayap kanan Hindu terhadap agama minoritas seperti Islam di India.

Literatur pertama berupa artikel ilmiah dengan judul 'Pengaruh Hindutva Dalam Kebijakan Pemerintah India Terkait Persoalan Imigran Muslim: Studi Kasus Amandemen UU Kewarganegaraan 2019' yang ditulis oleh Nahla Wahdatan Nasrah Asyari. Amandemen kewarganegaraan atau Citizen Amandemen Bill (CAB) pada tahun 2019 yang mana kebijakan ini dibuat berdasarkan ideologi Hindutva yang dinilai diskriminatif terhadap umat Muslim karena kebijakan tersebut berisi tentang penetapan kewarganegaraan bagi umat Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsi dan Kristen. Dengan disahkannya kebijakan tersebut menjadi Citizen Amandemen Act (CAA), banyak imigran yang kehilangan status kewarganegaraannya. CAA memiliki tujuan untuk mempercepat kewarganegaraan bagi warga Hindu, Parsis, Sikh, Budha, Jain, dan Kristen yang merasa teraniaya dan sudah berada di India sebelum tahun 2014. Sedangkan identitas umat Muslim sengaja terus di tutup-tutupi oleh CAA dengan membuat kebijakan baru yang di dalamnya tidak disebutkan mengenai kehidupan layak untuk umat Muslim dan para imigran Muslim lainnya. Dari kericuhan ini cukup banyak memakan korban yang di antaranya terluka hingga meninggal karena melawan hukum (Asyari, 2021).

Pemicu dari kerusuhan ini diawali oleh Undang Undang Amandemen yang dinilai sangat diskriminatif karena Undang Undang Amandemen tersebut di sebut-sebut sangat bertentangan dengan nilai sekuler negara dan memberikan kewarganegaraan berdasarkan agama. Kebijakan ini dibuat oleh partai sayap kanan, Bharatiya Janata Party (BJP) yang dikenal memiliki strategi tersendiri untuk menyingkirkan muslim di India dan secara tidak langsung cukup memecah belah umat di India. Dapat dilihat dalam penerapan NRC nasional yang sepertinya ingin mengubah India menjadi negara mayoritas Hindu. Hal ini juga dikarenakan setelah Narendra Modi mengesahkan CAB yang mungkin memiliki tujuan untuk mengutamakan Hindu atau menaikkan derajat Hindu di India. Tentunya hal ini sangat berhubungan dengan ideologi Hindutva yang sangat anarkis dan ingin berkuasa di India berdasarkan ideologi nya (Asyari, 2021).

Tulisan ini memberikan informasi penting terkait korelasi Hindutva dengan berbagai partai sayap kanan dalam usaha mengucilkan masyarakat Muslim di India serta bagaimana

pengaruh Hindutva terhadap keluarnya CAA 2019. Penelitian terkait amandemen CAA 2019 mempertegas penelitian ini bahwa Hindutva memiliki peran besar dalam membentuk stigma anti Muslim di India, bukan hanya dari segi politik tetapi juga dari segi ekonomi mengingat Hindutva memiliki ambisi untuk menjadikan India sebagai kekuatan satu-satunya di India. Adapun perbedaan penelitian terletak pada focus kajian yang dibahas, di mana penelitian ini membahas dari sisi ekonomi, yakni alasan mengapa kelompok sayap kanan ingin memboikot produk halal di India, sedangkan penelitian oleh Nahla membahas dari sisi politik berupa keluarnya Citizen Amandemen Act (CAA) 2019.

Tulisan selanjutnya berupa buku yang ditulis oleh Ajid Thohir dan Ading Kusdiana dengan judul 'Islam di Asia Selatan: Melacak Perkembangan Sosial, Politik Islam di India, Pakistan dan Bangladesh'. Tulisan ini membahas secara detail epistemologi Kawasan dunia Islam, keadaan umum anak benua India, termasuk struktur sosial, budaya dan demografi, pembentukan awal pemerintahan Muslim dan warisan peradaban Islam India periode pertengahan di mana masyarakat Hindu India percaya bahwa para agamawan Hindu dibunuh oleh sejumlah orang-orang Persia di lembah Balkh sehingga ini menyulitkan penyebaran Islam di tanah India pada masa lalu. Belum lagi para pemimpin Muslim di India seperti Ghaznawi yang melakukan penaklukan ke India menunjukkan sifat penaklukan yang banyak diwarnai kekerasan atau penjarahan (Thohir & Kusdiana, 2006).

Karakteristik tentara Muslim yang selalu heroik dalam setiap penaklukan dan pertempuran semakin mengukuhkan persepsi mereka secara umum. Penelitian ini juga membahas berakhirnya kejayaan Islam di India hingga lahirnya akar nasionalisme wilayah. Ketidaksukaan para masyarakat Hindu terhadap kejayaan Islam di India semakin diperparah dengan adanya kolonisasi Inggris pada abad ke-19 yang berkuasa di India. Mereka berusaha menggantikan posisi Islam dan menunjukkan bahwa ia sebagai 'tuan baru' yang lebih sopan dan beradab dibandingkan Islam. Pada periode pendudukan Inggris, Islam mendapat tekanan dari dua arah, yakni Inggris dan para nasionalis Hindu yang sejak lama ingin membangkitkan kekuatan India asli secara utuh (Thohir & Kusdiana, 2006).

Tulisan oleh Thohir dan Kusdiana memberikan informasi penting seputar penyebab konflik yang sudah lama terjadi di India, yang melibatkan masyarakat Hindu terutama mereka yang berasal dari kelompok sayap kanan melawan masyarakat Muslim. Berbagai faktor tersebut seperti keyakinan agama, budaya dan adat istiadat Hindu yang sulit menerima kebudayaan asing, faktor lainnya yakni masuknya Islam di India yang terkesan kejam dan dinilai mengancam eksistensi Hindu karena tidak lama setelah ekspansi, Islam berkembang sangat pesat di India, yang dianggap sebagai tanah kelahiran agama Hindu di dunia. Adapun perbedaan penelitian terletak pada fokus kajian yang dibahas, di mana penelitian ini membahas mengapa kelompok sayap kanan berkeinginan untuk memboikot produk halal di India melalui faktor etnosentrisme, kepercayaan agama dan sikap patriot. Berbeda dengan tulisan di atas yang tidak membahas kelompok sayap kanan secara detail, tulisan ini akan lebih banyak menjelaskan peran kelompok sayap kanan Hindu dalam upaya boikot produk halal yang bagi mereka merupakan wujud upaya menghalau dominasi Islam di India.

Tulisan terakhir berupa jurnal ilmiah dengan judul 'Institusi Minoritas dan struktur Sosial di India' yang ditulis oleh Raudatul Ulum Ruksin. Tulisan ini membahas berbagai poin penting terkait minoritas dan kasta di India, termasuk kebijakan terhadap minoritas, relasi antar umat beragama dan potensi konflik. India sendiri diketahui sebagai negara yang memegang teguh sistem kasta selama ribuan tahun. Kasta terendah yakni Dalit (yang berarti tertindas) berkembang sebagai kelompok rentan karena mereka berada diluar batas kasta atau orang buangan. Mayoritas kelompok masyarakat Dalit beragama Muslim dan seringkali mengalami penindasan dan diskriminasi. Rendahnya akses sosial, Pendidikan dan ekonomi membuat mereka yang dilahirkan dari kasta rendah tidak dapat melakukan mobilisasi sosial. Lalu dalam hal kebijakan terhadap minoritas, meskipun India termasuk ke dalam negara sekuler, kenyataannya perlindungan dan penghargaan agama minoritas masih minim (Ruksin, 2018).

Pemerintahan yang dikuasai partai sayap kanan Hindu, BJP kerap melakukan langkah intoleransi dan tidak simpatik kepada kelompok agama minoritas, tidak hanya kepada masyarakat Muslim, tetapi juga pada masyarakat Kristen. Kasus pengrusakan dan kekerasan yang mereka alami, terutama terjadi pada momen-momen politik di banyak negara bagian di mana persekusi terjadi secara aktif dan kerap kali terjadi di berbagai negara India. Tindakan persekusi ini termasuk pembakaran gereja, pengHindu-an kembali orang Kristen dengan paksaan dan ancaman kekerasan fisik, penyebaran bahan bacaan yang membuat ngeri, pembakaran Alkitab, perkosaan biarawati, pembunuhan pendeta Kristen, dan perusakan sekolah serta lembaga Pendidikan (Ruksin, 2018).

Tulisan oleh Raudatul Ulum memberikan informasi penting seputar Kebijakan penanganan minoritas di India memiliki bermacam tantangan, baik itu dari aspek harmonisasi antar peraturan maupun hambatan dalam sistem sosial. Dapat dipahami bahwa hubungan mayoritas dan minoritas di India terbangun dalam sebuah konsepsi yang dinamis. Dari aspek kesejarahan terdapat kerajaan Mughal, Muslim minoritas yang berkuasa dalam waktu yang lama, dan mewariskan suatu hubungan antarumat yang harus terus diperjuangkan. Masih terdapat komunitas penganut agama yang belum mendapat perlakuan setara, dan tentunya tidak memperoleh hak-hak perlakuan yang sama dari negara. Baik dalam bentuk *non-discrimination policy* maupun *affirmative policy*. Adapun perbedaan penelitian terletak pada fokus kajian yang dibahas, di mana penelitian Raudatul Ulum membahas secara garis besar kondisi masyarakat minoritas di India, sedangkan penelitian ini membahas alasan mengapa kelompok sayap kanan berkeinginan untuk memboikot produk halal di India.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Melalui penelitian deskriptif kualitatif, peneliti berusaha untuk mendapatkan pemahaman umum untuk melakukan analisis terhadap masalah yang menjadi fokus penelitian dan kemudian menarik sebuah kesimpulan. Penelitian deskriptif kualitatif juga menekankan pada pencarian makna, pengertian, konsep, dan deskripsi tentang suatu fenomena serta dijelaskan secara naratif (Yusuf, 2014). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

ialah sumber data sekunder. Sumber data sekunder ialah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti. Adapun sumber data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari jurnal dan artikel online.

KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat untuk merepresentasikan beberapa konsep serta hubungan masing-masing konsep tersebut. Untuk menjawab alasan mengapa kelompok sayap kanan ingin memboikot produk halal di India, penulis menggunakan analisis pohon konflik. Pohon konflik merupakan alat analisis konflik dengan gambar sebuah pohon untuk membantu mengurutkan isu-isu pokok suatu konflik dengan cara mengidentifikasi tiga hal yaitu inti suatu masalah, mengetahui sebab-sebab awal terjadinya konflik dan dampak yang muncul sebagai akibat dari konflik yang terjadi (Fahira & Fedryansyah, 2021).

Pohon konflik memiliki tiga bagian, yakni batang, akar dan cabang. Batang pohon menggambarkan masalah utama dari konflik yang terjadi di mana konflik secara eksplisit terlibat di dalamnya. Inti masalah ini terlihat dipermukaan dan tidak bersifat laten. Adapun akar merupakan penyebab masalah utama dapat terjadi yang merepresentasikan akar masalah konflik yang bersifat laten dan tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan efek konflik. Akar konflik berfungsi sebagai pondasi atau inti permasalahan. Terakhir cabang pohon atau daun merepresentasikan dampak yang disebabkan oleh konflik yang terjadi di dunia nyata, sehingga Analisa pohon konflik membantu peneliti memahami poin sebab dan akibat yang menyebabkan kelompok sayap kanan berkeinginan untuk memboikot produk halal di India (Fahira & Fedryansyah, 2021).

Berdasarkan pada operasionalisasi pohon konflik, akar penyebab dari ketegangan yang melibatkan kelompok sayap kanan dengan para pedagang Muslim disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, masyarakat Hindu India memiliki kekuatan peradaban lokal yang sangat kuat dan tangguh sehingga tidak bisa menerima Islam apa adanya. Kekuatan ini ditopang bukan hanya oleh tradisi intelektual atau adat istiadatnya, tetapi juga kekuatan spiritualisme Hindu yang mandarah daging ke dalam adat istiadat negara ini secara keseluruhan. Hal ini kemudian membentuk pola pikir, kelakuan dan tindakan masyarakatnya yang terintegratif dalam berbagai institusi kelembagaan agama dan pemerintah. Oleh karena itu, seluruh perilaku, baik tindakan individu maupun sosial secara keseluruhan selalu berada dalam kontrol dan pengawasan aristokrat serta tokoh religious di India, di mana mereka memiliki posisi yang sangat dihormati di negara tersebut (Thohir & Kusdiana, 2006). Salah satu wujud penentangan masyarakat Hindu terhadap Islam yang berkaitan dari produksi halal bisa dilihat pada metode penyembelihan daging. Masyarakat Hindu memiliki sistem metode sendiri yang disebut Jhatka yang berarti 'cepat' (OpIndia, 2022).

Metode Jhatka dilakukan dengan pemukulan bagian kepala hewan yang membuat mereka mati secara perlahan. Perbedaan utama lainnya antara Halal dan Jhatka adalah bahwa Jhatka tidak memiliki proses keagamaan yang mengikutinya dan oleh karena itu,

dapat dikonsumsi oleh semua orang terlepas dari afiliasi agamanya (OpIndia, 2022). Sayangnya, dalam metode jhatka menurut Dr V K Modi, kepala departemen teknologi daging di Central Food Technology Research Institute India, pembekuan darah berpotensi lebih tinggi sehingga bisa merusak tekstur daging jika dibiarkan mentah terlalu lama. Selain itu, juga bisa menyebabkan daging lebih keras saat dikunyah. Senada dengan Dr V K Modi, dr Karuna Chaturvedi seorang konsultan gizi di Rumah Sakit Apollo, New Delhi, India menuturkan bahwa metode penyembelihan lebih sehat karena darah terkuras dari arteri hewan. Hal itu dapat mengeluarkan racun karena jantung memompa selama beberapa detik setelah penyembelihan (Fauzi, 2016). Terlepas dari berbagai keunggulan sistem penyembelihan, bagi masyarakat Hindu, metode halal tentu menggunakan kepekaan praktik Islam seperti menyebut nama Allah pada saat proses penyembelihan yang mana hal ini tidak bisa diterima oleh masyarakat Hindu India (OpIndia, 2022).

Selain dari sudut pandang kebudayaan Hindu terkait Jhatka, halal secara inheren juga bersifat diskriminatif dan cukup menantang dalam beberapa hal untuk ukuran negara yang mayoritas penduduknya bukan beragama Muslim. Sangat penting untuk dicatat bahwa dalam industri daging, jika sebuah perusahaan ingin menghasilkan daging bersertifikat Halal, mereka tidak dapat mempekerjakan non-Muslim untuk menyembelih hewan tersebut. Mengingat bahwa beberapa orang Hindu yang terpinggirkan bekerja di industri daging, syarat bahwa hanya Muslim yang dapat menyembelih hewan tersebut menjadi diskriminatif terhadap orang Hindu yang terlibat dalam industri tersebut. Lebih jauh, itu berarti menegakkan prinsip-prinsip Islam pada non-Muslim. Seorang non-Muslim menjadi terpaksa mengonsumsi daging olahan yang diproduksi setelah menyebut nama Allah. Ini menentang hak-hak non-Muslim yang dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan ajaran agama Islam, yang tidak mereka ikuti (OpIndia, 2022).

Kedua, bagi masyarakat Hindu, sejarah masuknya Islam ke tanah India yang diwarnai dengan penaklukan secara kejam menjadi dendam tersendiri dan dianggap mencoreng martabat India sebagai negara tanah kelahiran agama Hindu di dunia. Rasa dendam akibat cerita turun temurun tentang pembunuhan para agamawan Hindu oleh sejumlah orang-orang Persia di lembah Balkh, kesan tentara Muslim yang selalu heroik di medan perang serta kesan eksklusif para pemimpin Islam di India yang mementingkan prestise kekuasaan dibandingkan menarik simpati masyarakat luas sedikit tidaknya mempengaruhi pandangan masyarakat Hindu India terhadap Islam secara umum. Rasa dendam ini termanifestasi ke dalam bentuk tindakan persekusi terhadap masyarakat Muslim di India yang sejatinya sudah lama terjadi (Thohir & Kusdiana, 2006). Mereka tidak ingin membiarkan Islam berkembang lebih jauh di tanah India, bahkan melalui ekspansi ekonomi sekalipun seperti produk halal.

Ketiga, selain karena hubungan sejarah Islam dan Hindu yang tidak begitu baik, India sendiri dikenal karena budaya minoritasnya. Orang India dikenal sangat nasionalis dan memiliki etika sosialis. Orang India seperti di negara maju lainnya bersikap patriotik dan lebih menyukai barang dalam negeri meskipun mereka tetap menerima produk dari negara lain. Mereka juga dikenal sangat etnosentris. Oleh karena itu, label buatan India adalah standar bagi mereka. Dalam konteks India, etnosentrisme memainkan peran penting

dalam mempengaruhi perilaku konsumen India mengenai pembelian produk halal. Mereka cenderung akan memilih produk non halal meskipun produk halal jauh lebih baik. Sikap etnosentrisme inilah yang menimbulkan perasaan seperti permusuhan terhadap produk halal (Tao et al., 2022).

Selanjutnya untuk operasionalisasi batang pohon, konflik yang melibatkan kelompok sayap kanan Hindu dengan para pedagang Muslim di India disebabkan oleh pengetatan produksi produk halal yang berasal dari kebijakan Lembaga yang berwenang untuk mengawasi kualitas dan keamanan makanan India. Lembaga ini meminta para penjual makanan menjalankan prosedur tambahan untuk memastikan produknya halal. Kelompok sayap kanan beranggapan bahwa sertifikasi halal saat ini sudah mulai diterapkan ke produk non daging, bahkan mulai diterapkan ke produk non makanan seperti kompleks perumahan, industri fashion hingga kosmetik. Mereka menganggap bahwa upaya ini merupakan agenda dari jihad ekonomi Islam yang dapat mengancam eksistensi ekonomi Hindu di India.

Terakhir untuk operasionalisasi daun atau cabang pohon bisa dilihat dari upaya kampanye besar-besaran di wilayah Kartanaka India yang dilakukan oleh kelompok sayap kanan Hindutva terhadap produk halal. Kampanye ini dihadiri ribuan orang di mana mereka dengan kompak menyerukan untuk memboikot seluruh produk halal di India. Dalam kampanye tersebut, mereka juga menghimbau agar masyarakat Hindu tidak membeli daging di toko-toko pedagang Muslim, melarang pedagang-pedagang Muslim berjualan di dekat kuil selama pameran kuil di Kartanaka serta menyebarkan ujaran kebencian bahwa jika berbelanja di pedagang-pedagang Muslim, uang dari masyarakat Hindu akan digunakan untuk melakukan gerakan terorisme di India. Gerakan kampanye ini berhasil mempengaruhi jutaan orang (OpIndia, 2022). Seruan boikot produk halal, khususnya boikot produk berlogo halal sehingga mendorong permusuhan terhadap produk halal), relatif berhasil dikampanyekan. Jutaan konsumen India (Hindu) telah mengikuti permintaan tokoh politik dan pembaca berita serta mendukung produk dan layanan non-halal. Para pedagang Muslim akhirnya dikucilkan oleh konsumen Hindu. Selain itu, mereka yang terbiasa berjualan di dekat kuil terpaksa harus mencari tempat lain untuk mendapatkan uang (Tao et al., 2022). Tindakan kampanye boikot produk halal ini merupakan serangkaian konflik yang melibatkan kelompok sayap kanan dengan Muslim dan dapat memperkeruh prospek perdamaian antar kedua kelompok di India.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ALASAN BOIKOT PRODUK HALAL OLEH KELOMPOK SAYAP KANAN INDIA

Etnosentrisme Masyarakat India yang Tangguh (Akar Konflik)

Berbeda dengan Kawasan lainnya seperti Afrika, Persia, dan Turki, Asia Selatan atau anak benua India sebagai bagian dari Kawasan dunia Islam secara historis sejak abad 8 memiliki karakteristik proteksionisme tersendiri sebagai sebuah kawasan budaya dalam menerima Islam sebagai kekuatan dunia saat itu. Kawasan tersebut cukup kontroversial dengan modal kekuatan peradaban lokalnya yang sangat kuat dan tangguh sehingga tidak bisa menerima Islam apa adanya. Kekuatan ini ditopang bukan hanya oleh tradisi intelektual

atau adat istiadatnya, tetapi juga kekuatan spiritualisme Hindu yang mandarah daging ke dalam adat istiadat negara ini secara keseluruhan.

Hal ini kemudian membentuk pola pikiran, kelakuan dan tindakan masyarakatnya yang terintegratif dalam berbagai institusi kelembagaan agama dan pemerintah (Thohir & Kusdiana, 2006). Oleh karena itu, seluruh perilaku, baik tindakan individu maupun sosial secara keseluruhan selalu berada dalam kontrol dan pengawasan aristokrat serta tokoh religious di India, di mana mereka memiliki posisi yang sangat dihormati di negara tersebut. Di bawah para aristokrat dan tokoh agama ini, semua masyarakat tidak bisa secara bebas berbicara untuk menentukan pola dan sikap sendiri-sendiri, baik dalam membangun arus psikologis, pemikiran sikap politik serta budaya.

Kekuatan peradaban lokal inilah yang juga menjadi akar etnosentrisme di masyarakat India, mereka yang berasal dari kelompok sayap kanan India percaya bahwa komunitas (masyarakat Hindu) sebagai bagian terpenting dari identitas mereka dan secara sadar merangkul orang lain yang memiliki budaya yang sama, sekaligus menolak mereka yang secara etnis berbeda dengan kelompoknya. Salah satu wujud dari etnosentrisme ini bisa dilihat pada keberadaan ideologi politik Hindutva yang dianut oleh kelompok sayap kanan. Ideologi ini menegaskan bahwa India adalah negara Hindu (bukan negara sekuler, seperti yang didefinisikan oleh Konstitusi India). Sikap anti-Muslim menjadi inti dari proses ini. Peristiwa dukungan CAA 2019 di negara bagian Jammu dan Kashmir telah memperjelas bahwa Hindutva didasarkan pada keyakinan bahwa umat Islam pada dasarnya bukanlah warga negara India.

Hal ini bukan tanpa sebab karena bagi pengikut Hindutva, mereka percaya bahwa India adalah negara Hindu yang telah dieksploitasi dan ditaklukan oleh dinasti Islam berturut-turut (kesultanan Delhi dan Mughal). Dengan perkembangan Islam di India berupa jumlah penduduknya yang semakin meningkat membuat kelompok sayap kanan khawatir akan kebangkitan Islam seperti di masa lalu (Asyari, 2021). berbagai cara kemudian dilakukan oleh kelompok sayap kanan untuk mencegah 'dominasi Islam', baik melalui upaya politik (mendukung CAA 2019 untuk mengusir imigran Muslim) maupun upaya ekonomi (memboikot produk halal, tidak membeli berbagai produk dari pedagang Muslim dan lainnya)

Sikap etnosentrisme budaya Hindu yang kuat juga menjadi indikasi penolakan terhadap kebiasaan atau budaya yang merefleksikan kepercayaan agama lainnya. Salah satu wujud penentangan masyarakat Hindu terhadap Islam yang berkaitan dari produksi halal bisa dilihat pada metode penyembelihan daging. Masyarakat Hindu memiliki sistem metode sendiri yang disebut Jhatka yang berarti 'cepat'. Metode Jhatka dilakukan dengan pemukulan bagian kepala hewan yang membuat mereka mati secara perlahan. Perbedaan utama lainnya antara Halal dan Jhatka adalah bahwa Jhatka tidak memiliki proses keagamaan yang mengikutinya dan oleh karena itu, dapat dikonsumsi oleh semua orang terlepas dari afiliasi agamanya (OpIndia, 2022). Sayangnya, dalam metode jhatka menurut Dr V K Modi, kepala departemen teknologi daging di Central Food Technology Research Institute India, pembekuan darah berpotensi lebih tinggi sehingga bisa merusak tekstur daging jika dibiarkan mentah terlalu lama.

Selain itu, juga bisa menyebabkan daging lebih keras saat dikunyah. Senada dengan Dr V K Modi, dr Karuna Chaturvedi seorang konsultan gizi di Rumah Sakit Apollo, New Delhi, India menuturkan bahwa metode penyembelihan lebih sehat karena darah terkuras dari arteri hewan. Hal itu dapat mengeluarkan racun karena jantung memompa selama beberapa detik setelah penyembelihan (Fauzi, 2016). Terlepas dari berbagai keunggulan sistem penyembelihan, bagi masyarakat Hindu, metode halal tentu menggunakan kepekaan praktik Islam seperti menyebut nama Allah pada saat proses penyembelihan yang mana hal ini tidak bisa diterima oleh masyarakat Hindu India, sehingga mayoritas diantara mereka tetap menggunakan cara Jhatka (memukul kepala hewan) disamping penyembelihan (OpIndia, 2022).

Selain dari sudut pandang kebudayaan Hindu terkait Jhatka, halal secara inheren juga bersifat diskriminatif dan cukup menantang dalam beberapa hal untuk ukuran negara yang mayoritas penduduknya bukan beragama Muslim. Sangat penting untuk dicatat bahwa dalam industri daging, jika sebuah perusahaan ingin menghasilkan daging bersertifikat Halal, mereka tidak dapat mempekerjakan non-Muslim untuk menyembelih hewan tersebut. Mengingat bahwa beberapa orang Hindu yang terpinggirkan bekerja di industri daging, syarat bahwa hanya Muslim yang dapat menyembelih hewan tersebut menjadi diskriminatif terhadap orang Hindu yang terlibat dalam industri tersebut. Lebih jauh, itu berarti menegakkan prinsip-prinsip Islam pada non-Muslim. Seorang non-Muslim menjadi terpaksa mengonsumsi daging olahan yang diproduksi setelah menyebut nama Allah. Ini menentang hak-hak non-Muslim yang dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan ajaran agama Islam, yang tidak mereka ikuti (OpIndia, 2022).

Adapun dalam konteks India, etnosentrisme konsumen didefinisikan sebagai kepercayaan di antara pembeli bahwa membeli barang halal adalah tidak tepat atau bahkan tidak etis dan berbahaya bagi ekonomi nasional, untuk agama Hindu, merugikan pekerjaan lokal, dan tidak patriotik. Konsumen etnosentris memegang pandangan kritis terhadap produk asing halal dan tidak mau membelinya. Seruan boikot produk halal, khususnya boikot produk berlogo halal (sehingga mendorong permusuhan terhadap produk halal), relatif berhasil dikampanyekan. Jutaan konsumen India (Hindu) telah mengikuti permintaan tokoh politik dan pembaca berita serta mendukung produk dan layanan non-halal. Misalnya, konsumen mendesak pemerintah India untuk tidak membubuhkan stempel halal dalam bahasa Arab dan membubuhkan non-halal (Jhatka) cap pada produk untuk kenyamanan mereka. Boikot, terutama boikot berbasis agama, dapat bertahan lama dan merusak, khususnya di sektor pemasaran, karena biasanya melibatkan pandangan pribadi yang dipegang teguh (Tao et al., 2022).

Bagi masyarakat Hindu, sejarah masuknya Islam ke tanah India yang diwarnai dengan penaklukan secara kejam juga menjadi dendam tersendiri dan dianggap mencoreng martabat India sebagai negara tanah kelahiran agama Hindu di dunia. Rasa dendam akibat cerita turun temurun tentang pembunuhan para agamawan Hindu oleh sejumlah orang-orang Persia di lembah Balkh, kesan tentara Muslim yang selalu heroik di medan perang serta kesan eksklusif para pemimpin Islam di India yang mementingkan prestise kekuasaan dibandingkan menarik simpati masyarakat luas sedikit tidaknya

mempengaruhi pandangan masyarakat Hindu India terhadap Islam secara umum. Rasa dendam ini termanifestasi ke dalam bentuk tindakan persekusi terhadap masyarakat Muslim di India yang sejatinya sudah lama terjadi (Thohir & Kusdiana, 2006).

Mereka tidak ingin membiarkan Islam berkembang lebih jauh di tanah India, bahkan melalui ekspansi ekonomi sekalipun seperti produk halal. Jika diperhatikan, semua wujud tindakan kelompok sayap kanan ini merupakan bentuk dari Islamophobia terstruktur karena elemen pemerintah sendiri mendukung adanya fenomena ini. Semenjak BJP berkuasa, umat Muslim di India mengalami tindakan persekusi dari masyarakat Hindu garis keras. Tampaknya, BJP juga mendukung tindakan persekusi tersebut, dan ini bisa dilihat dari ketiadaan hukum dan keadilan bagi mereka yang mengalami tindakan persekusi.

Kuatnya Patriotisme Kelompok Sayap Kanan Hindutva (Akar Konflik)

Menurut Tatalovich, Smith and Ferrari (2004) dalam Erlangga (2020), istilah Sayap Kanan atau biasa dikenali sebagai "Right Wing" dapat dijabarkan sebagai 'gerakan sosial yang bertujuan mempertahankan struktur ketertiban, status, kehormatan, atau perbedaan atau nilai sosial tradisional' dibandingkan dengan gerakan sayap kiri yang mencari 'kesetaraan yang lebih besar atau partisipasi politik. Kelompok ini kerap kali dikaitkan dengan kelompok konservatif, di mana diidentikkan atas dasar kesamaan tujuan terhadap penjagaan nilai-nilai sosial tradisional. Oleh karena itu, kita dapat melihat "Politik Konservatif" sebagai upaya yang dilakukan kelompok sayap kanan untuk mempertahankan hak istimewa dalam hierarki sosial yang ada. Seseorang dengan politik sayap kanan adalah mereka yang memandang ketimpangan sosial atau stratifikasi sosial sebagai hal yang wajar, normal, bahkan diinginkan. Baik sayap kiri dan sayap kanan ditemukan hampir seluruh berbagai negara di dunia, termasuk dalam hal ini India sebagai negara demokrasi terbesar di dunia.

Ada beberapa kelompok sayap kanan di India, mereka tergabung dalam afiliasi partai politik. Adapun pemimpin dari kelompok sayap kanan diwakili oleh partai politik yang sedang berkuasa di India, yakni Bharatiya Jhanata Party (BJP). BJP sendiri dikenal sebagai partai yang memegang teguh ideologi Hindutva dalam setiap kebijakannya. Salah satu yang paling menonjol dari kebijakan BJP sebagai upaya implementasi Hindutva bisa dilihat pada pelarangan penggunaan jilbab bagi siswa di sekolah, pelarangan pernikahan antara Hindu dan Islam, serta yang paling kontroversial yakni disahkannya amendemen UU kewarganegaraan 2019 di India.

BJP sendiri juga melalui juru bicara partai mendukung adanya upaya boikot terhadap produk halal yang dilakukan oleh kelompok sayap kanan di India. Mereka merasa bahwa semakin berkembangnya produk halal, justru akan mempersempit tenaga kerja Hindu, terutama mereka yang bekerja pada sektor industri daging. Jika sebuah perusahaan ingin menghasilkan daging bersertifikat Halal, mereka tidak dapat mempekerjakan non-Muslim untuk menyembelih hewan tersebut. Mengingat bahwa beberapa orang Hindu yang terpinggirkan bekerja di industri daging, syarat bahwa hanya Muslim yang dapat menyembelih hewan tersebut menjadi diskriminatif terhadap orang Hindu yang terlibat dalam industri tersebut (OpIndia, 2022).

Hal inilah yang mendorong kelompok sayap kanan termasuk BJP menentang keras pengetatan produksi produk halal di India karena dianggap mendiskriminasi orang-orang Hindu dan dianggap secara memaksa menegakkan prinsip-prinsip Islam pada Hindu. Mereka merasa keberatan mengonsumsi daging olahan yang diproduksi setelah menyebut nama tuhan lain (OpIndia, 2022). Melalui kampanye serta media sosial, kelompok sayap kanan menghimbau masyarakat Hindu untuk membeli produk dari pedagang Hindu serta tidak melakukan transaksi belanja dengan pedagang Muslim. Semua tindakan ini merupakan bagian dari sikap patriotisme kelompok sayap kanan Hindu, di mana sikap ini digambarkan sebagai kasih sayang dan kepedulian individu terhadap suatu bangsa, serta keluasan asosiasi seseorang dengan tanah dan bendera bangsa. Patriotisme menjelaskan keyakinan pribadi seseorang yang selaras dengan rekan domestiknya serta menghasilkan sebuah bentuk hubungan emosional.

Adanya Kebijakan Pengetatan Produksi Produk Halal (Batang Pohon Konflik)

Konflik yang melibatkan kelompok sayap kanan Hindu dengan para pedagang Muslim di India juga disebabkan oleh pengetatan produksi produk halal yang berasal dari kebijakan Lembaga yang berwenang untuk mengawasi kualitas dan keamanan makanan India. Lembaga ini meminta para penjual makanan menjalankan prosedur tambahan untuk memastikan produknya halal. Ini disebabkan karena keinginan dari lembaga tersebut untuk dapat memasarkan produknya ke pasar Arab. Tidak hanya berkeinginan menembus pasar Arab, berbagai produk lokal yang akan dipasarkan juga akan ditambahkan label produk halal. Satu bulan sebelumnya, tepatnya Maret 2022, organisasi Hindu sayap kanan, Bajrang Dal di negara bagian selatan Karnataka juga memasang poster selama festival lokal yang isinya meminta vendor Hindu untuk tidak membeli daging halal serta meminta orang untuk makan hanya di restoran Hindu. Kelompok sayap kanan beranggapan bahwa sertifikasi halal saat ini sudah mulai diterapkan ke produk non daging, bahkan mulai diterapkan ke produk non makanan seperti komplek perumahan, industri fashion hingga kosmetik. Mereka menganggap bahwa upaya ini merupakan agenda dari jihad ekonomi Islam yang dapat mengancam eksistensi ekonomi Hindu di India (Widiarini & Permatasari, 2016).

Dalam hal ini, sejatinya lembaga yang mengawasi kualitas dan keamanan makanan India harus memperhatikan kepekaan makanan antara umat Hindu dan Muslim. Pada catatan yang berbeda, hubungan domestik Hindu-Muslim yang sering tegang membuat Lembaga berwenang di negara tersebut harus memperhatikan kepekaan mayoritas penduduk Hindu ketika mempertimbangkan untuk menambahkan label halal ke produk yang dijual secara lokal karena kebijakan ini pada akhirnya memperburuk situasi hubungan antar kelompok agama yang semakin memanas, karena jika diperhatikan, rentang waktu kebijakan ini dibuat dengan berbagai konflik umat Hindu dan Muslim di India tidak jauh berbeda.

Misalnya, konflik besar-besaran setelah diberlakukannya CAA 2019 mengakibatkan bentrok antar kelompok agama di mana 38 orang tewas, di tahun yang sama, massa kelompok Hindu sayap kanan melakukan aksi boikot terhadap McDonald akibat menampilkan logo halal di produknya. Ada juga bentrok New Delhi tahun 2020 sebagai

kelanjutan dari amandemen UU kewarganegaraan 2019 mengakibatkan 53 orang tewas. Lalu pada tahun 2022 BJP mengeluarkan kebijakan larangan hijab di sekolah-sekolah bagian Karnataka yang memicu protes (Liputan6, 2022). Dengan demikian, kebijakan dari lembaga yang berwenang mengawasi kualitas makanan di India harus memperhatikan situasi domestik dalam negerinya mengingat situasi domestik sendiri merupakan variabel penting dalam menentukan kebijakan luar negeri maupun dalam negeri (Lestari, 2021).

KAMPANYE BOIKOT PRODUK HALAL DI INDIA (Daun/Cabang Pohon Konflik)

Kelompok sayap kanan India, Hindu Janajagruti Samiti telah mengkampanyekan boikot terhadap produk halal dan pedagang Muslim sejak April 2022. Alasan Hindu Janajagruti Samiti memboikot produk halal, lantaran kebijakan akan produk halal makin seenaknya sendiri. Aksi boikot produk halal diawali dengan adanya kebijakan lembaga yang berwenang untuk mengawasi kualitas dan keamanan makanan di India, meminta para penjual menjalankan prosedur tambahan untuk memastikan produknya halal. Hal ini disebabkan karena keinginan dari Lembaga tersebut untuk dapat memasarkan produknya ke pasar Arab. Tidak hanya berkeinginan menembus pasar Arab, berbagai produk lokal yang akan dipasarkan juga akan ditambahkan label produk halal. Satu bulan sebelumnya, tepatnya Maret 2022, organisasi Hindu sayap kanan, Bajrang Dal di negara bagian selatan Karnataka juga memasang poster selama festival lokal yang isinya meminta vendor Hindu untuk tidak membeli daging halal serta meminta orang untuk makan hanya di restoran Hindu (Kurnialam, 2022).

Kegiatan kampanye boikot produk halal kemudian berlanjut pada bulan September 2022. Kelompok sayap kanan yakni Hindu Janajagruti Samiti memulai Kembali kampanye mereka melawan pedagang Muslim dan produk halal. Mereka menghimbau umat Hindu untuk membeli barang hanya dari pedagang Hindu diseluruh Karnataka selama perayaan Dasara. Juru bicara kelompok sayap kanan, Mohan Gowda menghimbau umat Hindu untuk melakukan belanja terkait festival hanya di toko-toko milik umat Hindu dan menghindari produk halal. Dalam narasinya, ia juga menambahkan jika berbelanja di para pedagang Muslim atau membeli produk halal, maka uang yang digunakan untuk membeli produk tersebut akan digunakan untuk mendanai kegiatan teroris di India. Kelompok pro Hindu juga melarang pedagang Muslim di dekat kuil selama pameran kuil di Karnataka. Masalah pemotongan halal dan jhatka juga dibahas dan diperdebatkan secara luas di seluruh negeri (Kurnialam, 2022).

Sebelum kampanye besar-besaran melanda India terkait boikot produk halal, pada Agustus 2019 kelompok aktivis sayap kanan juga mengadakan demonstrasi di KFC dan McDonald sebagai tuntutan mereka untuk tidak menyajikan daging bersertifikat Halal kepada para non-muslim. Mereka memiliki pandangan bahwa restoran cepat saji tersebut melakukan pemaksaan pada umat Hindu untuk memakan daging bersertifikat halal yang bertentangan dengan keyakinan agama Hindu. Tidak hanya itu, gelombang demonstrasi dilakukan pada kedua restoran tersebut sebagai bentuk dominasi umat Hindu yang berupaya memperingatkan kepada semua toko di seluruh karnataka atas tuntutan mereka untuk memboikot produk halal, jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, para aktivis tersebut akan melakukan pemboikotan produk mereka secara nasional (Merdeka, 2019)

KESIMPULAN

Secara konstitusional India adalah negara sekuler, namun definisi ini tidak mencerminkan ideologi India semenjak BJP dari kelompok sayap kanan berkuasa. Kelompok sayap kanan di India memegang teguh ideologi politik Hindutva. Ideologi politik ini dikenal atas kontribusinya dalam berbagai kebijakan kontroversial yang membuat takut masyarakat minoritas. Kebijakan tersebut misalnya amandemen UU kewarganegaraan 2019 terkait persoalan imigran Muslim di mana mereka diusir dan dibunuh jika tidak segera pergi dari India. Kebijakan kontroversial Hindutva juga menyentuh ranah sosial seperti larangan penggunaan jilbab bagi siswa di sekolah. Selain menyentuh ranah kebijakan politik, Hindutva juga melebarkan pengaruh kebijakannya dari segi ekonomi. Hal ini bisa dilihat pada upaya boikot produk halal di India oleh kelompok sayap kanan.

Adapun alasan mengapa kelompok sayap kanan melakukan aksi boikot terhadap produk halal yakni sikap etnosentrisme masyarakat Hindu India yang Tangguh, sehingga tidak bisa menerima Islam apa adanya, ini termasuk dalam produksi produk daging halal yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepercayaan Hindu di India. Faktor kedua yakni kuatnya patriotisme kelompok Hindu sayap di mana mereka keberatan jika dalam sektor produksi halal, khususnya produksi daging tidak akan melibatkan non-Muslim sehingga timbul keinginan membantu sesama rekan seagama. Terakhir adanya kebijakan pengetatan produksi produk halal oleh Lembaga berwenang yang mengawasi makanan di India. Penulis melihat bahwa kebijakan yang tidak mempertimbangkan situasi domestik yang pada akhirnya memicu aksi boikot besar-besaran oleh kelompok sayap kanan terhadap produk halal di India. Hal ini tentu akan semakin mempersulit prospek perdamaian di India mengingat boikot produk ekonomi yang mengatasnamakan agama bersifat destruktif dan sulit untuk dihentikan karena menyangkut kepercayaan agama yang dipegang teguh.

REFERENSI

- Ahmad. (2022, July 20). *Vegetarisme dan Islamofobia Dianggap Penghalang Pertumbuhan Sektor Halal di India*. Hidayatullah. <https://hidayatullah.com/berita/internasional/2022/07/20/233672/vegetarisme-dan-islamofobia-dianggap-penghalang-pertumbuhan-sektor-halal-di-india.html>
- Asyari, N. W. N. (2021). *Pengaruh Hindutva dalam Kebijakan Pemerintahan India Terkait Persoalan Imigran Muslim (Studi Kasus Amandemen UU Kewarganegaraan Tahun 2019)* [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/39831>
- Aulia Mutiara Hatia Putri. (2023a, February 8). *Salip China, Jumlah Penduduk India Kini Terbanyak di Dunia!* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230208112247-128-412053/salip-china-jumlah-penduduk-india-kini-terbanyak-di-dunia>
- Aulia Mutiara Hatia Putri. (2023b, March 21). *Rahajeng Rahina Nyepi, Ini Negara dengan Umat Hindu Terbesar*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230321083803-128-423415/rahajeng-rahina-nyepi-ini-negara-dengan-umat-hindu-terbesar>
- Erlangga, A. F. (2020). *Polemik Kebijakan Deportasi Pemerintah India terhadap Pengungsi*

- Rohingya* [Universitas Diponegoro]. <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/8383/2/2. BAB I.pdf>
- Fahira, T., & Fedryansyah, M. (2021). Analisis Konflik Sengketa Lahan di Kawasan Kelurahan Tamansari Kota Bandung Menggunakan Pohon Konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 86–92. <http://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/31978>
- Fauzi, M. P. (2016, September 13). *Kelebihan Hewan yang Dipotong Secara Halal dari Sisi Sains*. Okezonee. <https://techno.okezone.com/read/2016/09/12/56/1487490/kelebihan-hewan-yang-dipotong-secara-halal-dari-sisi-sains>
- Kurnialam, A. (2022, September 30). *Kelompok Sayap Kanan Hindu India Kampanye Boikot Pedagang Muslim dan Produk Halal*. Republikali. <https://khazanah.republika.co.id/berita/rj114t320/kelompok-sayap-kanan-hindu-india-kampanye-boikot-pedagang-muslim-dan-produk-halal>
- Lestari, B. U. S. (2021). Analisis Perbedaan Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Dibawah Kepemimpinan Park Geun Hye dan Moon Jae In Terhadap Kepemilikan Senjata Nuklir Korea Utara. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 3(1), 81–109. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ijgd.v3i1.32>
- Liputan6. (2022, February 10). *Siswi Dilarang Berhijab Tuai Protes, Sekolah di Karnataka India Ditutup 3 Hari*. <https://www.liputan6.com/global/read/4882437/siswi-dilarang-berhijab-tuai-protas-sekolah-di-karnataka-india-ditutup-3-hari>
- Merdeka. (2019, August 28). *McDonald's India Diboikot karena Tampilkan Logo Halal*. <https://www.merdeka.com/dunia/mcdonalds-india-diboikot-karena-tampilkan-logo-halal.html>
- Office of the Registrar General & Census Commissioner India. (2011). *Population by Religious Community*. <https://web.archive.org/web/20150825155850/http://www.censusindia.gov.in/2011census/C-01/DDW00C-01 MDDS.XLS>
- OpIndia. (2022, April 4). *Why Jhatka lost to Halal, even in India: Understanding the challenges and the way ahead*. <https://www.opindia.com/2022/04/halal-vs-jhatka-faq-understanding-challenges-way-ahead-india/>
- Priyambodo, U. (2022, June 7). *India Bakal Jadi Negara dengan Penduduk Muslim Terbanyak di Dunia*. National Geographic Indonesia. <https://nationalgeographic.grid.id/read/133315369/india-bakal-jadi-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia?page=all>
- Ruksin, R. U. (2018). Institusi Minoritas dan Struktur Sosial di India. *Harmoni*, 17(1), 7–26. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v17i1.289>
- Tao, M., Lahuerta-Otero, E., Alam, F., Aldehayyat, J. S., Farooqi, M. R., & Zhuoqun, P. (2022). Do Religiosity and Ethnocentrism Influence Indian Consumers' Unwillingness to Buy Halal-Made Products? The Role of Animosity Toward Halal Products. *Frontiers in Psychology*, 13, 1–14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.840515>
- Thohir, A., & Kusdiana, A. (2006). *Islam di Asia Selatan: Melacak Perkembangan sosial, Politik Islam di India, Pakistan dan Bangladesh* (U. S. Artyasa (ed.)). Humaniora. [http://digilib.uinsgd.ac.id/4231/1/Islam di Asia Selatan - Ajid Thohir%2C Ading Kusdiana.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/4231/1/Islam%20di%20Asia%20Selatan%20-%20Ajid%20Thohir%2C%20Ading%20Kusdiana.pdf)
- Widiarini, A., & Permatasari, A. (2016, September 6). *Ternyata Kualitas Daging Halal Empuk*

dan Lembut. Viva. <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kuliner/818505-ternyata-kualitas-daging-halal-lebih-empuk-dan-lembut>

Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Kencana.